

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2020**



Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

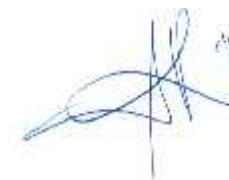
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Lamandau

1. **Nama Unit Organisasi** : Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Lamandau
2. **Tugas** : Membantu Bupati dalam urusan rumah tangga Pemerintahan Kabupaten Lamandau di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal secara terpadu bersama – sama Instansi terkait sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
3. **Fungsi** :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. penyelenggaraan administrasi dan teknis kegiatan promosi daerah;
 - c. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. melaksanakan pengendalian kegiatan promosi daerah, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - e. melaksanakan pemantauan, pengawasan, pembinaan, pelayanan, dan pelaporan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati..
4. **Indikator Kinerja Utama :**

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Mengukur efisiensi penggunaan sarana dan prasarana aparatur	Laporan Pelaksanaan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan Daftar inventaris Standar kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
b.	Tersedianya Informasi dan Pengaduan Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Mengukur efisiensi Pelayanan Perizinan dan penanaman Modal	Laporan penanganan pengaduan masyarakat
c.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Mengukur efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor	Daftar inventaris Standar kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

d.	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Mengukur tingkat Pendidikan dan Pelatihan formal pegawai DPMPTSP	Laporan Pendidikan dan Diklat Pegawai
e.	Jumlah Peningkatan / penurunan nilai realisasi PMDN	Mengukur kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	Laporan kegiatan Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi
f.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDA/PMA)	Mengukur jumlah nilai investasi berskala nasional	Laporan kegiatan Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi
g.	Terlaksananya kualitas pelayanan publik	Mengukur jumlah perijinan	Surat izin yang terbit
h.	Tersedianya data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
i.	Terlaksananya penyelenggaraan perizinan	Mengukur efisiensi penyelenggaraan perizinan	Laporan kegiatan Penyelenggaraan Perizinan

Nanga Bulik, Januari 2020
Kepala Dinas,



Ir. H. MASRUN, M.Si
NIP. 19600906 198903 1 018



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum	1
1. Kedudukan	1
2. Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi	1
3. Aparatur Pendukung, Sarana dan Prasarana , dan Jenis Perizinan di DPMPTSP.....	3
4. Sarana dan Prasarana	6
5. Jenis Perizinan di DPMPTSP.....	8
6. Isu Strategis dan Faktor – faktor Penentu Keberhasilan	23
B. Maksud dan Tujuan	26
C. Sistematika LAKIP	27
 BAB 2 Perencanaan Kinerja	 30
A. Rencana Strategis (RENSTRA) 2018 – 2023	30
1. VISI	
2. MISI	17
3. Tujuan dan Sasaran	31
4. Program	32
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	35
 BAB 3 Akuntabilitas Kinerja	 39
A. Pengukuran Kinerja	39
1. Metode Pengukuran Kinerja	39
2. Hasil Pengukuran Kinerja	40



3.	Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran	41
B.	Capaian Kinerja Organisasi	42
C.	Realisasi Keuangan	39
BAB 4	Penutup	55

LAMPIRAN-LAMPIRAN.



KATA PENGANTAR

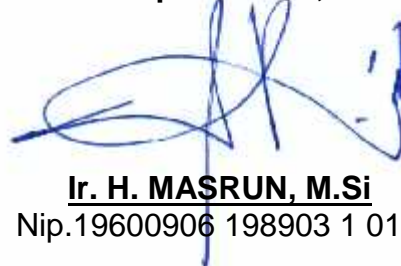
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau disampaikan dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai salah satu bahan acuan/rujukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamandau tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Semester II tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang Perizinan dan penanaman modal yang telah digariskan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamandau serta sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Semester II Tahun 2019 ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi peningkatan kinerja bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, Januari 2020

Kepala Dinas,



Ir. H. MASRUN, M.Si

Nip.19600906 198903 1 018



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamandau Semester II Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. LAKIP melaporkan capaian kinerja (**performance results**) sesuai dengan rencana kinerja (**performance plan**) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamandau Tahun 2019 melaksanakan 4 (empat) sasaran strategis sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran DPMPTSP dengan pagu anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2019 sebesar **Rp 5.323.032.897,-**

Dari pengukuran pencapaian sasaran pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau, penilaian kinerja **Berhasil** dengan nilai pencapaian indikator **89,76**.

Dengan adanya Peraturan Bupati Lamandau tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lamandau di bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamandau maka dalam tahun ke depan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan aparatur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM pada DPMPTSP melalui Pelatihan dan Diklat Pelayanan Perizinan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur
3. Peraturan Daerah yang mendukung dalam Pelayanan Perizinan



BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. KEDUDUKAN

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau disingkat DPMPTSP yang sebelumnya berbentuk Badan, terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau memiliki kedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

2. KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1) Kewenangan dan Tugas Pokok

a. Kewenangan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau memiliki kewenangan sebagai unsur penunjang Penyelenggaraan Teknis Pelayanan Administrasi Publik Pemerintah Kabupaten Lamandau di bidang Perizinan sebagai pintu masuk dan keluarnya Proses Perizinan baik Perizinan bidang Perdagangan, Perizinan bidang Konstruksi, Perizinan bidang Koperasi, Perizinan Perkebunan, Perizinan Pertambangan, Perizinan Penanaman Modal dan Perizinan bidang lainnya sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Lamandau sebagai daerah yang kondusif bagi investasi.



b. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok membantu Bupati Lamandau dalam menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. penyelenggaraan administrasi dan teknis kegiatan promosi daerah;
3. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
4. melaksanakan pengendalian kegiatan promosi daerah, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
5. melaksanakan pemantauan, pengawasan, pembinaan, pelayanan, dan pelaporan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

2) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang-bidang terdiri dari:
 - a. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:



- 1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
 - 3) Seksi Promosi Penanaman Modal.
- b. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:
- 1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - 3) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- c. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari:
- 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I;
 - 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II; dan
 - 3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III.
- d. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
- 1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - 2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 - 3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Tim Teknis.

3. Aparatur Pendukung, Sarana dan Prasarana dan Jenis Perizinan di DPMPTSP .

1) Aparatur Pendukung

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau per 31 Desember 2019 memiliki 25 (dua puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau terdiri dari 2 (dua) orang Pasca Sarjana (S2), 12 (dua belas) orang Sarjana (S1), 2 (dua) orang



Diploma 3, dan 9 (sembilan) orang SMA. Berdasarkan Jabatan Struktural Eselon II.b ada 1 (satu) orang, Eselon III.a ada 1 (satu) orang, Eselon III.b ada 4 (empat) orang dan Eselon IV.a ada 7 (tujuh) orang.

*Tabel 1.1
Status Kepegawaian*

No	Status	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	25 Orang
2		
	Jumlah	25 Orang

*Tabel 1.2
Berdasarkan Golongan*

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV	3 Orang	Aktif
2	III	11 Orang	Aktif
3	II	11 Orang	Aktif
4	I	-	-
	Jumlah	25 Orang	Aktif

*Tabel 1.3
Berdasarkan Jabatan Struktural*

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	IV	7 Orang	Aktif
2	III	5 Orang	Aktif
3	II	1 Orang	Aktif
4	I	-	-
	Jumlah	13 Orang	Aktif



*Tabel 1.4
Jumlah PNS Non Jabatan*

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Non Jabatan	12 Orang	Aktif

*Tabel 1.5
Berdasarkan Jenis Kelamin PNS*

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Pria	10 Orang	Aktif
2	Wanita	15 Orang	Aktif

*Tabel 1.6
Berdasarkan Komposisi Tingkat Pendidikan*

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca sarjana (S2)	2 Orang	Aktif
2	Sarjana (SI)	12 Orang	Aktif
3	Sarjana Muda D3/Akademi	2 Orang	Aktif
4	SLTA	9 Orang	Aktif
5	SLTP	-	-
6	SD/SR	-	-
	Jumlah	25 Orang	Aktif



*Tabel 1.7
Berdasarkan jenis Diklat/Kursus yang diikuti*

No	Jenis Diklat/Kursus	Jumlah	Keterangan
1	Spamen/Diklat Tk. II	1 Orang	Aktif
2	Sepadya/Spama/Diklat Tk. III	3 Orang	Aktif
3	Sepala/Adum/Diklat Tk IV	6 Orang	Aktif
4	Khusus Manajemen Proyek	-	-
5	ANJB	-	-
6	MKD	-	-
7	Bendaharawan	2 Orang	Aktif
8	Arsiparis	-	-

4. Sarana dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau menggunakan sarana dan prasarana pengadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana baik itu Gedung kantor, kendaraan dinas, meubelair dan peralatan gedung kantor sebagai sarana dan prasarana penunjang administrasi dan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.



TABEL 1.8

*Data Aset Dan Jumlahnya
Per Desember 2019*

JENIS	JUMLAH (UNIT)	KETERANGAN
MOBIL DINAS	4	TOYOTA AVANZA, TOYOTA GRAND NEW AVANZA, HILUX DOUBLE CABIN
SEPEDA MOTOR DINAS	9	1 UNIT HONDA MEGA PRO, 4 UNIT JUPITER Z, 1 UNIT ZEON, 1UNIT VIXION, 1 UNIT MIO GT DAN 1 UNIT KAWASAKI
AC	21	11 UNIT MERK LG DAN 10 UNIT SAMSUNG
PRINTER	40	22 UNIT MERK CANON, 2 UNIT MERK HP LASER JET, 1 UNIT MERK LG DAN 15 UNIT MERK EPSON
PC UNIT	30	2 UNIT MERK LG, 1 UNIT MERK SAMSUNG, 6 MERK ACER, 1 MERK AXIO, 8 UNIT MERK ASUS, 10 UNIT MERK HP DAN 1 UNIT MERK XEON
LAPTOP	12	3 UNIT MERK TOSHIBA, 7 UNIT MERK ACER, 1 UNIT HP DAN 1 UNIT ASUS
KURSI	131	KURSI RAPAT, KURSI BIASA, KURSI TAMU, KURSI PUTAR, KURSI TUNGGU, KURSI KERJA ESELON DAN KURSI LIPAT
MEJA	73	MEJA PANJANG, MEJA BIRO, MEJA MAKAN, MEJA KOMPUTER, MEJA KERJA ESELON, MEJA STAF
LEMARI	23	LEMARI BESI DAN LEMARI KAYU
TELEPON	12	MERK PANASONIK
CAMERA DIGITAL	4	MERK SONY 3 BUAH DAN MERK CANON 1 BUAH
MESIN TIK	3	MESIN TIK
BRANKAS	2	MERK NASIONAL
FILLING BESI DAN KAYU	23	FILLING KABINET
GENERATOR	1	UNIT
HANDPHONE	14	10 UNIT MERK SAMSUNG DAN 4 UNIT MERK ASUS
HARDISK	10	2 UNIT MERK ASUS, 7 UNIT MERK TOSHIBA, DAN 1 MERK SONY
MESIN POTONG RUMPUT	1	MERK STHIL
MICROPHONE	1	SOUDCREAST
MODEM	4	TP-LINK
PROYEKTOR	1	INFOCUS
RAK BESI DAN RAK KAYU		BESI DAN KAYU
SOFA	2	MERK OLYMPIC
TELEVISI	2	MERK LG
TENDA	1	-
TELISI	2	MERK LG
TERALIS	1	-



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Semester II Tahun 2019*

TANGGA ALUMINIUM	1	-
UPS	5	-
KIPAS ANGIN	2	-
PAPAN PENGUMUMAN	1	-
LEMARI ES	1	TOSHIBA
ANTHENA SHF	1	TANAKA
FACSIMILE	1	PANASONIC
GPS	2	-
RUMAH JAGA	1	UKURAN 8X6 METER
RUMAH PARKIR	1	UKURAN 12 X 6 METER
RUMAH GENSET	1	UKURAN 1,5X1,5 METER
PAGAR KANTOR	1	194 METER
GEDUNG KANTOR	1	-
LUAS TANAH	1	6,676 M ²
GEDUNG POS JAGA	1	-
KANTIN	1	-
SCANNER	2	FUJITSU DAN PLUSTEK
CCTV 8 CHANEL	8	KAPASITAS 6 TB
TIANG BESI UMBUL - UMBUL		-
MONITOR TOUCH SCREN	1	19 INCHI
KURSI PUTAR / KURSI PUBLIK	6	-
KAKI BESI	4	UNTUK MEJA
MEJA RAPAT	12	MODEL MD-1475 TW / MDj-757
KURSI PUTAR UNTUK RAPAT	25	EXPO METAL
MESIN POTONG RUMPUT	1	-
AC SPLIT	6	SHARP
TANGGA ALUMUNIUM	1	TELESCOP
GORDEN	1	KAIN
TERALIS	1	BESI
GEDUNG BANGUNAN ARSIP, RUANG RAPAT DAN TOILET	1	-
MESIN KETIK ELEKTRONIK	1	BROTHER
MESIN ABSENSI WAJAH	1	FINGER SPOT
LEMARI ES 2 PINTU	1	POLYTRON
NOTE BOOK	5	HP



5. Jenis Perizinan di DPMPTSP

Jenis Perizinan yang dapat dilayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada Tabel 1.9.

*TABEL 1.9
Jenis Perizinan dan Nonperizinan*

No.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		YANG MENANDATANGANI
1	2	3		4
			PERIZINAN	
I	Penanaman Modal	1	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	Kepala DPMPTSP
		4	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri	Kepala DPMPTSP
		5	Izin Usaha (Perluasan, Perubahan dan Penggabungan) Penanaman Modal Dalam Negeri	Kepala DPMPTSP
		6	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	Kepala DPMPTSP
		7	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri	Kepala DPMPTSP
		8	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri	Kepala DPMPTSP
			PERIZINAN	
I	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Kepala DPMPTSP
		2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Kepala DPMPTSP
		3	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Konferensi dan Pameran	Kepala DPMPTSP
		4	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	Kepala DPMPTSP
		5	Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri	Kepala DPMPTSP
		6	Tanda Daftar Industri (TDI)	Kepala DPMPTSP
		7	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Kepala DPMPTSP
		8	Izin Usaha Simpan Pinjam	Kepala DPMPTSP
		9	Izin Pembukaan Kantor Cabang Usaha	Kepala DPMPTSP



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Semester II Tahun 2019*

			Simpan Pinjam	
		10	Izin Pemakaian Kios/Lapak	Kepala DPMPTSP
		11	Izin Penyimpanan bahan Bakar untuk Industri	Kepala DPMPTSP
		12	Izin Penjualan Minuman beralkohol/Miras	Kepala DPMPTSP
		13	Izin Pengilingan Padi	Kepala DPMPTSP
		14	Izin Distributor Pupuk Bersubsidi	Kepala DPMPTSP
		15	Izin Pasar	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Rekomendasi Penjualan Minuman beralkohol/Miras	Bupati Lamandau
		1	Rekomendasi Penjualan Minuman beralkohol/Miras	Kepala Diskoperindag
		2	Rekomendasi Izin Pengilingan Padi	Kepala Diskoperindag
		3	Rekomendasi Izin Distributor Pupuk Bersubsidi	Kepala Diskoperindag
		4	Rekomendasi Izin Pasar	Kepala Diskoperindag
		5	Rekomendasi Surat Ketetapan Pedagang Pasar	Kepala Diskoperindag
		6	Rekomendasi Izin Barak/ Rumah Sewa	Kepala Diskoperindag
			PERIZINAN	
II	Kesehatan	1	Izin Apotik	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Toko Obat	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Penyelenggaraan Optikal	Kepala DPMPTSP
		4	Izin Toko Obat Tradisional	Kepala DPMPTSP
		5	Izin Praktik Dokter	Kepala DPMPTSP
		6	Izin Praktik Bidan	Kepala DPMPTSP
		7	Izin Kerja Perawat	Kepala DPMPTSP
		8	Izin Praktik Perawat	Kepala DPMPTSP
		9	Izin Klinik Bersalin Pratama	Kepala DPMPTSP
		10	Izin Klinik Pratama	Kepala DPMPTSP
		11	Izin Klinik Kecantikan Estetika Tipe Pratama	Kepala DPMPTSP
		12	Izin Klinik Bersalin Utama	Kepala DPMPTSP
		13	Izin Klinik Utama	Kepala DPMPTSP
		14	Izin Klinik Kecantikan Estetika Tipe Utama	Kepala DPMPTSP
		15	Izin Mendirikan Dan menyelenggarakan Rumah Sakit Tipe Umum Tipe C dan D	Kepala DPMPTSP
		16	Izin Mendirikan Dan menyelenggarakan Rumah Sakit Khusus Tipe C	Kepala DPMPTSP
		17	Izin Laboratorium Swasta	Kepala DPMPTSP
		18	Izin Penyelenggaraan Spa	Kepala DPMPTSP
		19	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	Kepala DPMPTSP



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Semester II Tahun 2019*

		20	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Kepala DPMPTSP
		21	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnosnik	Kepala DPMPTSP
		22	Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Fisioterafis	Kepala DPMPTSP
		23	Izin Toko Alat Kesehatan	Kepala DPMPTSP
		24	Izin Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)	Kepala DPMPTSP
		25	Izin Praktik Dokter Gigi	Kepala DPMPTSP
		26	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis	Kepala DPMPTSP
		27	Izin Praktik Dokter Spesialis	Kepala DPMPTSP
		28	Izin Kerja Perawat Gigi	Kepala DPMPTSP
		29	Izin Praktik Apoteker	Kepala DPMPTSP
		30	Izin Kerja Apoteker	Kepala DPMPTSP
		31	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	Kepala DPMPTSP
		32	Izin Praktik Fisioterafis	Kepala DPMPTSP
		33	Izin Praktik Okupasi terafis	Kepala DPMPTSP
		34	Izin Praktik Terafis Wicara	Kepala DPMPTSP
		35	Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO)	Kepala DPMPTSP
		36	Izin Kerja Radiografer	Kepala DPMPTSP
		37	Izin Bagi Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif	Kepala DPMPTSP
		38	Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	Kepala Dinkes
		1	Rekomendasi Izin Apotik	Kepala Dinkes
		2	Rekomendasi Izin Toko Obat	Kepala Dinkes
		3	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Optikal	Kepala Dinkes
		4	Rekomendasi Izin Toko Obat Tradisional	Kepala Dinkes
		5	Rekomendasi Izin Praktik Dokter	Kepala Dinkes
		6	Rekomendasi Izin Praktik Bidan	Kepala Dinkes
		7	Rekomendasi Izin Kerja Perawat	Kepala Dinkes
		8	Rekomendasi Izin Praktik Perawat	Kepala Dinkes
		9	Rekomendasi Izin Klinik Bersalin Pratama	Kepala Dinkes
		10	Rekomendasi Izin Klinik Pratama	Kepala Dinkes
		11	Rekomendasi Izin Klinik Kecantikan Estetika Tipe Pratama	Kepala Dinkes
		12	Rekomendasi Izin Klinik Bersalin Utama	Kepala Dinkes
		13	Rekomendasi Izin Klinik Utama	Kepala Dinkes
		14	Rekomendasi Izin Klinik Kecantikan Estetika Tipe Utama	Kepala Dinkes
		15	Rekomendasi Izin Mendirikan Dan menyelenggarakan Rumah Sakit Tipe Umum	Kepala Dinkes



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Semester II Tahun 2019*

			Type C dan D	
		16	Rekomendasi Izin Mendirikan Dan menyelenggarakan Rumah Sakit Khusus Tipe C	Kepala Dinkes
		17	Rekomendasi Izin Laboratorium Swasta	Kepala Dinkes
		18	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Spa	Kepala Dinkes
		19	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	Kepala Dinkes
		20	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Kepala Dinkes
		21	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnosnik	Kepala Dinkes
		22	Rekomendasi Izin Toko Alat Kesehatan	Kepala Dinkes
		23	Rekomendasi Izin Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)	Kepala Dinkes
		24	Rekomendasi Izin Praktik Dokter Gigi	Kepala Dinkes
		25	Rekomendasi Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis	Kepala Dinkes
		26	Rekomendasi Izin Praktik Dokter Spesialis	Kepala Dinkes
		27	Rekomendasi Izin Kerja Perawat Gigi	Kepala Dinkes
		28	Rekomendasi Izin Praktik Apoteker	Kepala Dinkes
		29	Rekomendasi Izin Kerja Apoteker	Kepala Dinkes
		30	Rekomendasi Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	Kepala Dinkes
		31	Rekomendasi Izin Praktik Fisioterafis	Kepala Dinkes
		32	Rekomendasi Izin Praktik Okupasi terafis	Kepala Dinkes
		33	Rekomendasi Izin Praktik Terafis Wicara	Kepala Dinkes
		34	Rekomendasi Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO)	Kepala Dinkes
		35	Rekomendasi Izin Kerja Radiografer	Kepala Dinkes
		36	Rekomendasi Izin Bagi Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif	Kepala Dinkes
		37	Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat	Kepala Dinkes
			PERIZINAN	
III	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Izin Usaha Angkutan Bermotor	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Angkutan Barang Khusus	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Trayek Darat/ Sungai/ Baru dan Perpanjangan	Kepala DPMPTSP
		4	Izin Trayek Angkutan Pedesaan	Kepala DPMPTSP
		5	Kartu Pengawas (KP) Angkutan Pedesaan	Kepala DPMPTSP



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Semester II Tahun 2019*

		6	Izin Insidentil Angkutan Pedesaan / Angkot	Kepala DPMPTSP
		7	Izin Sertifikasi dan Past Kapal	Kepala DPMPTSP
		8	Izin Penyelenggaraan Pos	Kepala DPMPTSP
		9	Izin Pendirian Jasa Titipan <u>ntuk Kantor Agen</u>	Kepala DPMPTSP
		10	Izin Warung Telekomunikasi (Wartel)	Kepala DPMPTSP
		11	Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)	Kepala DPMPTSP
		12	Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator	Kepala DPMPTSP
		13	Izin Instalasi Penangkal Petir Menara Telekomunikasi	Kepala DPMPTSP
		14	Izin Penggalan Kabel Telekomunikasi	Kepala DPMPTSP
		15	Izin Instalasi Genset Menara Telekomunikasi	Kepala DPMPTSP
		16	Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi	Kepala DPMPTSP
		17	Izin TV Kabel	Kepala DPMPTSP
		18	Izin Warung Internet (Warnet)	Kepala DPMPTSP
		19	Izin Pendirian Menara Telekomunikasi	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Bermotor	Kepala Dishub
		2	Rekomendasi Izin Angkutan Barang Khusus	Kepala Dishub
		3	Rekomendasi Izin Trayek Darat/ Sungai/ Baru dan Perpanjangan	Kepala Dishub
		4	Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Pedesaan	Kepala Dishub
		5	Rekomendasi Kartu Pengawas (KP) Angkutan Pedesaan	Kepala Dishub
		6	Rekomendasi Izin Isidentil Angkutan Pedesaan / Angkot	Kepala Dishub
		7	Rekomendasi Izin Sertifikasi dan Past Kapal	Kepala Dishub
		8	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos	Kepala Dishubkomimfo
		9	Rekomendasi Izin Pendirian Jasa Titipan <u>ntuk Kantor Agen</u>	Kepala Dishubkomimfo
		10	Rekomendasi Izin Warung Telekomunikasi (Wartel)	Kepala Dishubkomimfo
		11	Rekomendasi Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)	Kepala Dishubkomimfo
		12	Rekomendasi Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator	Kepala Dishubkomimfo
		13	Rekomendasi Izin Instalasi Penangkal Petir Menara Telekomunikasi	Kepala Dishubkomimfo



		14	Rekomendasi Izin Penggalian Kabel Telekomunikasi	Kepala Dishubkomimfo
		15	Rekomendasi Izin Instalasi Genset Menara Telekomunikasi	Kepala Dishubkomimfo
		16	Rekomendasi Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi	Kepala Dishubkomimfo
		17	Rekomendasi Izin TV Kabel	Kepala Dishubkomimfo
		18	Rekomendasi Izin Warung Internet (Warnet)	Kepala Dishubkomimfo
		19	Rekomendasi Izin Pendirian Menara Telekomunikasi	Kepala Dishubkomimfo
			PERIZINAN	
IV	Sosial Dan Ketenaga Kerjaan	1	Izin Pengumpulan Uang / Sumbangan Sosial dengan Cara Mencetak dan menjual Karcis	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang / Sumbangan Sosial Dengan Cara Mencetak dan Menjual Karcis	Kepala Dinsos
		2	Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja	Kepala Disnakertrans
		3	Rekomendasi Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Kepala Disnakertrans
			PERIZINAN	
V	Keparawisataan	1	Tanda Daftar Usaha Hotel Berbintang	Kepala DPMPTSP
		2	Tanda Daftar Usaha Restoran, Rumah Makan, tempat makan dan jasaboga	Kepala DPMPTSP
		3	Tanda Daftar Usaha Permainan ketangkasan elektronik termasuk bingo dan sejenisnya	Kepala DPMPTSP
		4	Tanda Daftar Usaha Biro perjalanan dan agen perjalanan wisata.	Kepala DPMPTSP
		5	Tanda Daftar Usaha Ruang Serba Guna	Kepala DPMPTSP
		6	Tanda Daftar Usaha Karaoke VIP Room / Non VIP Room.	Kepala DPMPTSP
		7	Tanda Daftar Usaha Taman Rekreasi	Kepala DPMPTSP
		8	Tanda Daftar Usaha Kolam Pemancingan	Kepala DPMPTSP



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Semester II Tahun 2019*

		9	Tanda Daftar Usaha Pameran Seni / Pasar Seni / Galeri	Kepala DPMPTSP
		10	Tanda Daftar Usaha Tempat Bilyard	Kepala DPMPTSP
		11	Tanda Daftar Usaha Persewaan Audio Visual, VCD dan sejenis Play Station.	Kepala DPMPTSP
		12	Tanda Daftar Usaha Perizinan Pramuwisata.	Kepala DPMPTSP
		13	Tanda Daftar Usaha Musik hidup dan panggung hiburan (terbuka, tertutup)	Kepala DPMPTSP
		14	Tanda Daftar Usaha Pertunjukan Film.	Kepala DPMPTSP
		15	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	Kepala DPMPTSP
		16	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	Kepala DPMPTSP
		17	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	Kepala DPMPTSP
		18	Tanda Daftar Usaha Jasa Makan dan Minum	Kepala DPMPTSP
		19	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Pariwisata	Kepala DPMPTSP
		20	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	Kepala DPMPTSP
		21	Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata	Kepala DPMPTSP
		22	Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	Kepala DPMPTSP
		23	Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	Kepala DPMPTSP
		24	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	Kepala DPMPTSP
		25	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	Kepala DPMPTSP
		26	Tanda Daftar Usaha Spa	Kepala DPMPTSP
		27	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	Kepala DPMPTSP
		28	Tanda Daftar Sanggar Senam	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Hotel Berbintang	Kepala Dispar
		2	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Restoran, Rumah Makan, tempat makan dan jasa boga	Kepala Dispar
		3	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Permainan ketangkasan elektronik termasuk bingo dan sejenisnya	Kepala Dispar
		4	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Biro perjalanan dan agen perjalanan wisata.	Kepala Dispar



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Semester II Tahun 2019*

		5	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Ruang Serba Guna	Kepala Dispar
		6	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Karaoke VIP Room / Non VIP Room.	Kepala Dispar
		7	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Taman Rekreasi	Kepala Dispar
		8	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Kolam Pemancingan	Kepala Dispar
		9	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pameran Seni / Pasar Seni / Galeri	Kepala Dispar
		10	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Tempat Bilyard	Kepala Dispar
		11	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Persewaan Audio Visual, VCD dan sejenis Play Station.	Kepala Dispar
		12	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Perizinan Pramuwisata.	Kepala Dispar
		13	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Musik hidup dan panggung hiburan (terbuka, tertutup)	Kepala Dispar
		14	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pertunjukan Film.	Kepala Dispar
		15	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	Kepala Dispar
		16	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	Kepala Dispar
		17	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	Kepala Dispar
		18	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Jasa Makan dan Minum	Kepala Dispar
		19	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Pariwisata	Kepala Dispar
		20	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	Kepala Dispar
		21	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata	Kepala Dispar
		22	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	Kepala Dispar
		23	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	Kepala Dispar
		24	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	Kepala Dispar



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Semester II Tahun 2019*

		25	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	Kepala Dispar
		26	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Spa	Kepala Dispar
		27	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	Kepala Dispar
		28	Rekomendasi Tanda Daftar Sanggar Senam	Kepala Dispar
			PERIZINAN	
VI	Pemerintahan	1	Izin Penetapan Lokasi Rumah Ibadah	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Pertimbangan Teknis Izin Lokasi Rumah Ibadah	Asisten Pemerintahan dan Kesra
		2	Rekomendasi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	Asisten Pemerintahan dan Kesra
		3	Rekomendasi izin Rumah Ibadah	Bupati Lamandau
			PERIZINAN	
VII	Lingkungan Hidup	1	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit	Kepala DPMPTSP
		4	Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit	Kepala DPMPTSP
		5	Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Rekomendasi Analisis Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	Kepala DLHK
		2	Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	Kepala DLHK
		3	Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit	Kepala DLHK
		4	Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit	Kepala DLHK



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Semester II Tahun 2019*

		5	Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)	Kepala DLHK
			PERIZINAN	
VIII	Pertanian, Peternakan dan Perikanan	1	Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Usaha Peternakan	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Rumah Potong Hewan	Kepala DPMPTSP
		4	Surat Izin Penangkapan Ikan Perikanan (SIPI)	Kepala DPMPTSP
		5	Surat Izin Pembudidayaan Ikan Perikanan (SIPBI)	Kepala DPMPTSP
		6	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Kepala DPMPTSP
		7	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Kepala DPMPTSP
		8	Izin Usaha Pertokoan (Bidang Perikanan)	Kepala DPMPTSP
		9	Izin Toko Obat Hewan	Kepala DPMPTSP
		10	Tanda Daftar Usaha Peternakan	Kepala DPMPTSP
		11	Izin Potong Hewan	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	Kepala Distanakan
		1	Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	Kepala Distanakan
		2	Rekomendasi Izin Usaha Peternakan	Kepala Distanakan
		3	Rekomendasi Izin Rumah Potong Hewan	Kepala Distanakan
		4	Surat Izin Penangkapan Ikan Perikanan (SIPI)	Kepala Distanakan
		5	Rekomendasi Surat Izin Pembudidayaan Ikan Perikanan (SIPBI)	Kepala Distanakan
		6	Rekomendasi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Kepala Distanakan
		7	Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Kepala Distanakan
		8	Rekomendasi Izin Usaha Pertokoan (Bidang Perikanan)	Kepala Distanakan
		9	Rekomendasi Izin Toko Obat Hewan	Kepala Distanakan
		10	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Peternakan	Kepala Distanakan
		11	Rekomendasi Izin Potong Hewan	Kepala Distanakan
			PERIZINAN	
IX	Perkebunan	1	Persetujuan Prinsip	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Lokasi	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Kepala DPMPTSP



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Semester II Tahun 2019*

		4	Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)	Kepala DPMPTSP
		5	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	Kepala DPMPTSP
		6	Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B)	Kepala DPMPTSP
		7	Surat Tanda Daftar Pengolahan(STD-P)	Kepala DPMPTSP
		8	SK Penetapan CP/CL Kelompok Tani Plasma	Kepala DPMPTSP
		9	Izin Usaha Pembelian dan Penjualan TBS	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Pertimbangan Teknis Izin Lokasi	Kepala BPN, PUPR, Distanakan, DLHK
		2	Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUPP)	Kepala BPN, PUPR, Distanakan, DLHK
		3	Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	Kepala BPN, PUPR, Distanakan, DLHK
		4	Pertimbangan Teknis Pengurusan Hak Guna Usaha (HGU)	Kepala BPN, PUPR, Distanakan, DLHK
		5	Pertimbangan Teknis Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B)	Kepala Distanakan
		6	Pertimbangan Teknis Surat Tanda Daftar Pengolahan(STD-P)	Kepala Distanakan
		7	Pertimbangan Teknis Penetapan CP/CL Kelompok Tani Plasma	Kepala Distanakan
		1	Rekomendasi Persetujuan Prinsip	Bupati Lamandau
		2	Rekomendasi Izin Lokasi	Bupati Lamandau
		3	Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Bupati Lamandau
		4	Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)	Bupati Lamandau
		5	Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	Bupati Lamandau
		6	Rekomendasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B)	Bupati Lamandau
		7	Rekomendasi Surat Tanda Daftar Pengolahan(STD-P)	Bupati Lamandau
		8	Rekomendasi Penetapan CP/CL Kelompok Tani Plasma	Bupati Lamandau
			PERIZINAN	
X	Minyak dan Gas	1	Izin Pangkalan Elpigi	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Pengecer Elpigi	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas	Kepala DPMPTSP



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Semester II Tahun 2019*

			NON PERIZINAN	
		1	Rekomendasi Izin Pangkalan Elpigi	Bupati Lamandau
		2	Rekomendasi Izin Pengecer Elpigi	Bupati Lamandau
		3	Rekomendasi Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas	Bupati Lamandau
		4	Rekomendasi Pengurusan Izin Usaha Ketenagalistrikan	Bupati Lamandau
		5	Rekomendasi Pengurusan Izin Operasi Dan Izin Menjual Daya Listrik	Bupati Lamandau
	Pertambangan	1	Rekomendasi Galian C	Bupati Lamandau
			PERIZINAN	
XI	Pendidikan	1	Izin Pendirian Sekolah (TK, SD dan SMP sejenis)	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Operasional Sekolah(TK, SD dan SMP sejenis)	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan	Kepala DPMPTSP
		4	Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kepala DPMPTSP
		5	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Kepala DPMPTSP
		6	Izin Operasional Lembaga Pendidikan Informal	Kepala DPMPTSP
		7	Izin Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Kepala DPMPTSP
		8	Tanda Daftar Usaha Sanggar Seni dan Budaya)	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah (TK, SD dan SMP sejenis)	Kepala Disdikbud
		2	Rekomendasi Izin Operasional Sekolah(TK, SD dan SMP sejenis)	Kepala Disdikbud
		3	Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan	Kepala Disdikbud
		4	Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kepala Disdikbud
		5	Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Kepala Disdikbud
		6	Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Pendidikan Informal	Kepala Disdikbud
		7	Rekomendasi Izin Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Kepala Disdikbud
		8	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Sanggar Seni dan Budaya)	Kepala Disdikbud



			PERIZINAN	
XII	Pekerjaan Umum	1	Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Tinggal/Usaha/Industri/Sosial)	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Penyewaan Alat Berat	Kepala DPMPTSP
		4	Izin Tempat Pemakaman	Kepala DPMPTSP
		5	Izin Tempat Pembuangan Akhir dan Pelayanan Angkutan Bidang Kebersihan	Kepala DPMPTSP
		6	Izin Membangun Prasarana (IMP) Jalan dan Jembatan	Kepala DPMPTSP
		7	Izin Membangun Prasarana (IMP) Sumber Daya Air	Kepala DPMPTSP
		8	Izin Usaha Pelayanan Angkutan Di Bidang Kebersihan	Kepala DPMPTSP
		9	Izin Usaha Pengelolaan Sampah	Kepala DPMPTSP
		10	Izin Usaha Pemusnahan / Pemaanfaatan Sampah dan Air Kotor	Kepala DPMPTSP
		11	Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Lokasi Shoting Film	Kepala DPMPTSP
		12	Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Bazar, Perlombaan, Sarasehan, Pameran, Acara Ritual dan Lainnya	Kepala DPMPTSP
		13	Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Perkemahan	Kepala DPMPTSP
		14	Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Bedeng Proyek (Direksi Keet)	Kepala DPMPTSP
		15	Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Material Pekerjaan Proyek	Kepala DPMPTSP
		16	Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Titik Lubang Tiang Umbul-Umbul	Kepala DPMPTSP
		17	Izin Penggunaan Bangunan Dilokasi Taman dan Jalur Hijau	Kepala DPMPTSP
		18	Izin Pemakaian Lokasi Taman Pemakaman Untuk Shoting Film	Kepala DPMPTSP
		19	Izin Pemakaman Jenazah (Pada Lokasi TPU Yang Dikelola Pemerintah Daerah)	Kepala DPMPTSP
		20	Izin Mengangkut Jenazah Keluar Wilayah Kabupaten Lamandau	Kepala DPMPTSP
		21	Izin Usaha Jasa Pelayanan Pemakaman	Kepala DPMPTSP
		22	Izin Usaha Angkutan Jenazah	Kepala DPMPTSP
		23	Izin Penggunaan Tanah Makam dan Pemasangan Plaket	Kepala DPMPTSP



		24	Penerbitan Surat Izin Rumah Kost	Kepala DPMPTSP
		25	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)	Kepala DPMPTSP
		26	Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Tinggal/Usaha/Industri/Sosial)	Kepala Dinas PUPR
		2	Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Kepala Dinas PUPR
		3	Rekomendasi Izin Penyewaan Alat Berat	Kepala Dinas PUPR
		4	Rekomendasi Pengukuran Lahan	Kepala Dinas PUPR
		5	Rekomendasi Izin Membangun Prasarana (IMP) Jalan dan Jembatan	Kepala Dinas PUPR
		6	Rekomendasi Izin Membangun Prasarana (IMP) Sumber Daya Air	Kepala Dinas PUPR
		7	Rekomendasi Izin Usaha Pelayanan Angkutan Di Bidang Kebersihan	Kepala Dinas PUPR
		8	Rekomendasi Izin Usaha Pengelolaan Sampah	Kepala Dinas PUPR
		9	Rekomendasi Izin Usaha Pemusnahan / Pemanfaatan Sampah dan Air Kotor	Kepala Dinas PUPR
		10	Rekomendasi Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Lokasi Shoting Film	Kepala Dinas PUPR
		11	Rekomendasi Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Bazar, Perlombaan, Sarasehan, Pameran, Acara Ritual dan Lainnya	Kepala Dinas PUPR
		12	Rekomendasi Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Perkemahan	Kepala Dinas PUPR
		13	Rekomendasi Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Bedeng Proyek (Direksi Keet)	Kepala Dinas PUPR
		14	Rekomendasi Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Material Pekerjaan Proyek	Kepala Dinas PUPR
		15	Rekomendasi Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Titik Lubang Tiang Umbul-Umbul	Kepala Dinas PUPR
		16	Rekomendasi Izin Penggunaan Bangunan Dilokasi Taman dan Jalur Hijau	Kepala Dinas PUPR
		17	Rekomendasi Izin Pemakaian Lokasi Taman Pemakaman Untuk Shoting Film	Kepala Dinas PUPR
		18	Rekomendasi Izin Pemakaman Jenazah (Pada	Kepala Dinas PUPR



			Lokasi TPU Yang Dikelola Pemerintah Daerah)	
		19	Rekomendasi Izin Mengangkut Jenazah Keluar Wilayah Kabupaten Lamandau	Kepala Dinas PUPR
		20	Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pelayanan Pemakaman	Kepala Dinas PUPR
		21	Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Jenazah	Kepala Dinas PUPR
		22	Rekomendasi Izin Penggunaan Tanah Makam dan Pemasangan Plaket	Kepala Dinas PUPR
		23	Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Rumah Kost	Kepala Dinas PUPR
		24	Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)	Kepala Dinas PUPR
		25	Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)	Kepala Dinas PUPR
		26	Rekomendasi Izin Reklame	Kepala Dinas PUPR
			PERIZINAN	
XIII	Kesbang Pol	1	Izin Penelitian	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Rekomendasi Izin Penelitian	Kepala Kesbangpol
		2	Rekomendasi Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Kepala Kesbangpol
			PERIZINAN	
XIV	Pendapatan Asli Daerah	1	Izin Reklame	Kepala DPMPTSP

Sumber: Keputusan Bupati Lamandau Nomor:188.45/301/VIII/HUK/2017

6. Isu Strategis dan Faktor – faktor Penentu Keberhasilan

Permasalahan yang masih terlihat di masyarakat antara lain masih banyak masyarakat yang belum memiliki Izin Usaha, pengurusan Perizinan yang lambat, rumit dan masih belum memenuhi harapan/keinginan masyarakat membuat Pemerintah berupaya melakukan peningkatan di bidang Perizinan dan Penanaman Modal. Faktor internal dilihat berdasarkan kekuatan dan kelemahan DPMPTSP, sedangkan faktor eksternal dilihat berdasarkan peluang dan ancaman yang dihadapi DPMPTSP. Berdasarkan pemetaan tersebut, dirumuskan isu strategis pelayanan DPMPTSP.



A. Faktor Internal DPMPTSP

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none">1. Kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang semakin berkembang2. Memiliki kewenangan untuk mengelola perizinan, non Perizinan dan penanaman modal3. Adanya kemauan yang kuat dari personil untuk maju	<ol style="list-style-type: none">1. Sumber daya keuangan yang sangat terbatas2. Sumber daya manusia yang profesional masih belum mencukupi3. Sumber belajar yang terbatas4. Koordinasi yang kurang optimal5. Regulasi yang berubah ubah6. Sarana dan prasarana pelayanan Perizinan yang kurang7. pengembangan sistem informasi Perizinan masih belum optimal

B. Faktor Eksternal DPMPTSP

Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none">1. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan, non Perizinan dan penanaman modal yang prima, terpercaya dan transparan sangat tinggi2. Pelayanan Perizinan dan penanaman modal sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi3. Adanya regulasi yang mendukung terciptanya kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan4. Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal5. Adanya dorongan publik menjadikan SKPD Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal menjadi Institusi yang terpercaya.	<ol style="list-style-type: none">1. Kepastian hukum atas perizinan usaha yang masih terkait dengan instansi / lembaga pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan birokrasi yang panjang dan berbelit-belit2. Sumberdaya manusia dan akses modal usaha rendah3. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan penanaman modal



Berdasarkan pemetaan tersebut di atas maka isu strategis dalam pelayanan Perizinan dan Penanaman modal oleh DPMPTSP dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kinerja aparatur badan
 - a. SDM yang profesional terbatas
 - b. Sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung pelayanan Perizinan yang belum lengkap.
 - c. Dukungan Anggaran yang terbatas
2. Kualitas pelayanan Perizinan
 - a. Belum maksimal/optimalnya sistem informasi Perizinan yang transparan dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.
 - b. Belum optimalnya tugas Tim Teknis dan mekanisme proses persetujuan Perizinan.
 - c. Masih terdapatnya regulasi yang menjadi acuan Perizinan yang belum sesuai dengan kondisi terkini (mutakhir)
 - d. Belum efektifnya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan Perizinan. Hal ini terlihat dari adanya perubahan peruntukan dari izin yang diberikan.
 - e. Belum Optimalnya Koordinasi antar SKPD pemberi Pelayanan
 - f. Peningkatan Status kelembagaan belum diikuti dengan Peningkatan Anggaran.
3. Pemahaman masyarakat/perusahaan tentang proses Perizinan
 - a. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang perlunya/ manfaat mengurus Perizinan.
 - b. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang prosedur dan persyaratan Perizinan
 - c. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang tata ruang dan kaitannya dengan Perizinan.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

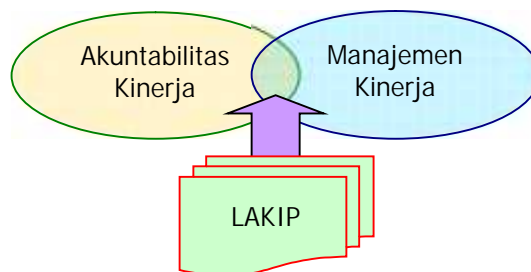
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. LAKIP merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun memiliki dua fungsi yang merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP DPMPTSP.

Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati dan masyarakat).

Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Penyusunan LAKIP Semester II 2019



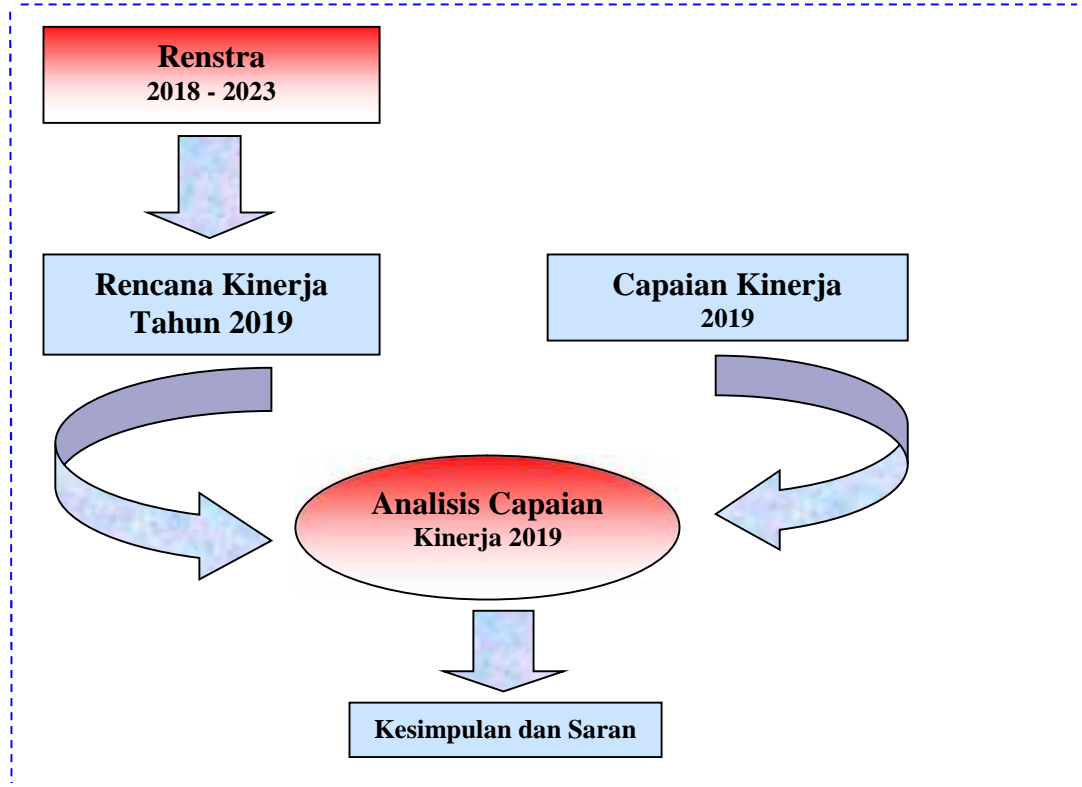


- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, LAKIP Semester II DPMPTSP 2019 merupakan sarana pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati dan masyarakat atas pencapaian kinerja DPMPTSP selama Semester II tahun 2019 meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai DPMPTSP.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, LAKIP Semester II DPMPTSP 2019 merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen Semester II DPMPTSP 2019 untuk perbaikan dari kelemahan dan kekurangan yang ditemukan untuk dirumuskan strategi pemecahannya dan perbaikan di tahun selanjutnya.

C. SISTEMATIKA LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Semester II Tahun 2019 mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semester II (DPMPTSP) 2019 diperbandingkan dengan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan selama tahun 2019 sehingga dapat dilihat celah kinerja yang memungkinkan adanya perbaikan di tahun mendatang.

Memperhatikan Surat Edaran Menpan Nomor: 10/ M.PAN/1/2004 tanggal 6 Januari 2004, maka alur pikir penyusunan LAKIP DPMPTSP 2016 secara skematis dapat disajikan sebagai berikut adalah :



Sistematika penyajian LAKIP Semester II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 2019 sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Rencana Kinerja

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

C. Akuntabilitas Keuangan

BAB 4 PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Uraian singkat masing - masing bab adalah sebagai berikut:

- Bab I **Pendahuluan**; menjelaskan secara ringkas gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP dan sistematika penyusunan LAKIP DPMPTSP 2019.
- Bab II **Perencanaan Kinerja**; menjelaskan Rencana Strategis DPMPTSP selama periode 2018 – 2023 dan Rencana Kerja Tahun 2019.
- Bab III **Akuntabilitas Kinerja**; menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Uraian selanjutnya adalah Akuntabilitas Keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, dan disertai dengan penyajian Laporan Perhitungan Anggaran.
- Bab IV **Penutup**; menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2019 dan saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka perencanaan pelaksanaan Pelayanan Perizinan Prima secara cepat dan tepat serta terpadu, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode lima tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun disebut Renstra yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kegiatan DPMPTSP.

Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP 2018 – 2023 merupakan alat bantu yang terukur bagi penilaian Kepala Dinas pada akhir tahun anggaran dengan menggunakan tolak ukur yaitu (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018 - 2023

Dalam rangka mensinergi Perencanaan Pelayanan Perizinan secara cepat dan efisien serta terpadu di Kabupaten Lamandau maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau berkewajiban menyusun dokumen perencanaan, yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) 2018 – 2023 yang merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)



sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertujuan agar penyelenggaraan Pemerintah dapat efektif, efisien dan ekonomis, maka tersusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamandau 2018 – 2023 diharapkan dapat mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan prima di bidang Perizinan dengan memperhatikan faktor – faktor lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap masalah internal maupun eksternal baik pada saat ini maupun masa yang akan datang dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan ekonomi daerah.

1. TUJUAN, SASARAN dan KEBIJAKAN

Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan dan semesteran.

Untuk menetapkan tujuan, sasaran serta kebijakan strategis perlu memperhatikan permasalahan pokok yang timbul dalam pelaksanaan tugas, antara lain :

1. Perangkat peraturan daerah yang belum mendukung untuk mengakomodir seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah;
2. Bagaimana meningkatkan PAD dan Pendapatan Daerah yang lainnya setiap tahunnya, sesuai dengan potensi yang ada secara optimal;
3. Bagaimana meningkatkan pelayanan khususnya terhadap para masyarakat / pengusaha daerah;
4. Luas wilayah dan cakupan obyek yang tersebar;
5. Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur dalam Pelayanan Perizinan;
6. Bagaimana mensosialisasikan peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat.

Penetapan sasaran dan program-program kegiatan tersebut disesuaikan dengan prediksi kemampuan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.



Berdasarkan permasalahan tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan tujuan dan sasaran dalam Tahun 2019 sebagai berikut :

Tujuan DPMPTSP adalah **Meningkatkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan** dengan sasaran:

1. Meningkatnya realisasi investasi daerah, dan
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan investasi dan perizinan.

Rumusan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP memuat indikator kinerja yang disajikan dalam tabel dibawah ini

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, tumbuh dan berkembang diberbagai sektor serta peningkatan pelayanan publik yang prima		Nilai investasi PMDN dan PMA meningkat	
		1. Meningkatnya iklim investasi daerah	Besaran Nilai investasi (PMDN/PMA) (Triliun)	9.938.853.845.920,58
			Persentase peningkatan nilai realisasi investasi pmdn/pma (%)	8,78
		2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan investasi dan perizinan	Nilai IKM Meningkat (indeks)	81,25 (100)
			Jumlah masyarakat yang mengakses pelayanan perizinan secara online (Jumlah Izin)	500

2. PROGRAM

Pada Tahun 2019 Program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dan tertuang dalam DPA



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019 adalah :

Agenda “ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ”, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7. Penyediaan Alat Tulis kantor
8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Peralatan rumah tangga
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
13. Penyediaan makanan dan minuman kantor
14. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
15. Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Agenda “ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ”, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
2. Pembangunan gedung kantor
3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
4. Penataan Halaman Kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

Agenda “ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ”, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan pelatihan formal



Agenda “ Program Peningkatan Disiplin Aparatur“, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

Agenda “ Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi“, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan potensi unggulan daerah
2. Penyelenggaraan Pameran dan promosi didalam dan luar negeri
3. Temu usaha PMDN, PMA dan UMKM
4. Penyelenggaraan pameran tingkat kabupaten

Agenda “ Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi“, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal
2. Pembinaan, monitoring dan evaluasi PMA, PMDN dan PBS

Agenda “ Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat“, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan informasi dan penangan pengaduan masyarakat

Agenda “ Program Peningkatan Pelayanan Perizinan“, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Penyelenggaraan Perizinan
3. Monitoring dan Evaluasi Perizinan
4. Sosialisasi Pelayanan Perizinan
5. Pendataan Perizinan



B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

Rencana kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa datang yang dinyatakan telah ditetapkan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Diharapkan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan Rencana Tahunan dari Rencana Strategis yang memberikan gambaran lebih detail sasaran dan strategis pencapaiannya dan dapat dijadikan sebagai penghubung perencanaan strategis, rencana tindak maupun perencanaan operasional yang terinci, menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran; memudahkan melakukan pengukuran kinerja; memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja; sehingga dapat memudahkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan target atau beban berdasarkan pencapaian kinerja karena mencantumkan indikator sasaran beserta target kinerjanya serta indikator kinerja kegiatan.



Adapun Sasaran dan target yang dicapai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau pada Tahun 2019 :

Sasaran		Satuan	Target
Uraian	Indikator		
1	2	3	4
1 Meningkatnya iklim investasi daerah	1 Jumlah informasi potensi unggulan daerah yang dipublikasikan	Informasi Unggulan Daerah	3
	2 Jumlah Pameran dan promosi didalam dan di luar Negeri yang diikuti	Kali	3
	3 Jumlah Temu Usaha PMA, PMDN dan UMKM	Kali	1
	4 Jumlah Pameran tingkat Kabupaten yang dilaksanakan	Kali	1
	5 Jumlah kunjungan Peningkatan Pemantauan, Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kali	12
	6 Jumlah Kunjungan Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS)	Kali	12
2 Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan investasi dan perizinan	1 Jumlah Laporan SKM	Laporan	2
	2 Jumlah peserta sosialisasi pelayanan perizinan	Orang	120
	3 Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelayanan terpadu kcamatan	Kecamatan	8
	4 Cakupan penyelenggaraan perizinan	Bulan	12
	5 Jumlah data Perizinan	Kecamatan	2



Program Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Tahun 2019 :

No	Program	No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000
		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	117.102.000
		3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	6.200.000
		4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	337.106.932
		5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	67.500.120
		6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	47.850.000
		7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	92.751.744,50
		8.	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	33.450.000
		9.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	26.000.000
		10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190.659.562
		11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.306.669
		12.	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	14.520.000
		13.	Penyediaan Makanan dan minuman kantor	9.960.000
		14.	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	436.322.844,50
		15.	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	130.560.050
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.	Penataan Halaman Kantor	160.500.000
		2.	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	0
		3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	9.500.000
		4.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	102.502.600
		5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	21.500.000
		6.	Pembangunan Gedung Kantor	190.511.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur	1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	27.470.000
4.	Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi	1.	Pengembangan potensi unggulan daerah	311.075.000
		2.	Penyelenggaraan pameran dan promosi di Dalam dan luar negeri	27.730.836
		3.	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	16.898.000



No	Program	No	Kegiatan	Anggaran
5.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	4.	Temu usaha PMDN, PMA dan UMKM	25.975.000
		1.	Peningkatan Pemantauan , Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	68.903.900
		2.	Pembinaan, monitoring dan evaluasi PMA, PMDN dan PBS	15.475.000
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.	Pengadaan pakaian dinas Beserta Perlengkapannya	0
		2.	Pengadaan Pakaian khusus Hari Hari tertentu	41.925.000
7.	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	1.	Survei indeks kepuasan masyarakat (IKM)	17.820.000
		2.	Penyelenggaraan Perizinan	12.166.000
		3.	Monitoring dan Evaluasi Perizinan	14.377.500
		4.	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	46.375.000
		5.	Pendataan Perizinan	14.290.000
8.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.	Pengembangan informasi terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal	0
9.	Program Mengintensifkan Penanganan Pegaduan Masyarakat	1.	Pelayanan Informasi dan Penanganan pengaduan masyarakat	10.000.000



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran serta tujuan organisasi.

A. PENGUKURAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- 1). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:



$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan untuk menunjukkan kaitan secara langsung antara sasaran dengan indikator kinerjanya sehingga dapat dilihat dengan jelas keberhasilan rencana kinerja.

Selain itu pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, sehingga dapat secara langsung menunjukkan keterkaitan antara indikator kegiatan dengan indikator sasaran.

2. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (ultimate outcomes) dan indikator benefit. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

- a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).



- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

3. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

>85	Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$	Berhasil
$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
$X \leq 55$	Tidak Berhasil

Penyimpulan capaian indikator sasaran:

Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “**Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok**”. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal dan diberi nilai tengah sebagai berikut:

Sangat Berhasil	Nilai Tengah 92,5%
Berhasil	Nilai tengah 77,5%
Cukup Berhasil	Nilai tengah 62,5%
Tidak Berhasil	Nilai tengah 27,5%



Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i f_i$$

dimana n = jumlah indikator kinerja sasaran
 m_i = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja
sasaran f_i = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval
 k = jumlah interval

Rata-rata dari Hasil perkalian jumlah indikator tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.**

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau merupakan pertanggungjawaban Kepala Kantor atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan. Namun Pengembangan Sistem AKIP akan terus kami laksanakan walaupun dalam perjalanannya belum seperti yang diharapkan sehingga masih perlu perubahan yang membangun.

Dengan adanya Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dengan adanya Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,



maka banyak izin – izin yang dilimpahkan oleh instansi terkait ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamandau tahun 2019 memiliki 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran DPMPTSP Kabupaten Lamandau dapat dilihat dibawah ini.

Sasaran Strategis

Meningkatnya investasi daerah yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja dengan 2 (dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4

No	Indikator Sasaran	Satuan	Semester II Tahun 2018			Semester II Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Kenaikan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA		67,96	2,21	3,25	2.21	1.63	73.57
2	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	2.581 Trilyun	9.136 Trilyun	353,92	9.337 Trilyun	9,284 Trilyun	99,43
CAPAIAN KINERJA					180,21			86,5

Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian Meningkatkan investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja sebesar 86,5% dengan katagori **berhasil**. Dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran semuanya belum mencapai target yaitu indikator



sasaran persentase kenaikan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA capaian kinerjanya 73,57%, dan indikator Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) yang tingkat capaian kinerjanya 99,43%. Tingkat capaian kinerja Semester II tahun 2019 (86,5%) lebih rendah dari tahun 2018 (180,21%).

Pencapaian target sasaran strategis Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja juga memperlihatkan capaian indikator makro daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Makro Daerah
Semester II Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase Kenaikan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA	Persen	2.21	1.63	73.57
2.	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	9337980476281.22	9284612864376	99.43

Realisasi capaian indikator makro daerah untuk Semester II tahun 2019 belum mencapai target. Lambatnya pertumbuhan investasi disebabkan potensi sumberdaya yang diusahakan investor sebagian besar bertumpu pada sektor perkebunan besar kelapa sawit. Bidang pertambangan dan kehutanan belum dikelola secara optimal. Sedangkan sektor unggulan yang dikelola oleh masyarakat juga hanya bertumpu pada kebun kelapa sawit yang dikelola. Untuk meningkatkan investasi perlu menumbuhkan industri kreatif yang tidak terbatas pada perusahaan perusahaan besar tetapi juga investasi modal kecil.

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran ini antara lain:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Kegiatan:
 - a. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Pameran dan Promosi didalam dan luar negeri;
 - c. Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten.
 - d. Temu Usaha PMDN, PMA dan UMKM.
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Invstasi, Kegiatan:



- a. Peningkatan, Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS.

Sasaran Strategis

Meningkatnya Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan investasi dan perizinan yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4

No	Indikator Sasaran	Satuan	Semester II Tahun 2018			Semester II Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Masyarakat yang mengurus Perizinan	izin		851	-	500	927	185,40
2	Survei kepuasan masyarakat pelayanan perizinan	indek	80	80,35	102,84	81,25	81,25	100
CAPAIAN KINERJA								142,70

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran sudah mencapai target dari 500 izin di tahun 2019 realisasi 927 izin di Semester II tahun 2019 dengan kategori sangat berhasil. Target SKM untuk Semester II tahun 2019 sudah tercapai.

Pencapaian target sasaran strategis tersebut juga memperlihatkan capaian indikator makro daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :



Tabel 3.4
Pencapaian Indikator Makro Daerah
Semester II Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Jumlah Masyarakat yang mengurus Perizinan	Izin	500	927	185,40
2.	Survei kepuasan masyarakat pelayanan perizinan	Indek	81,25	81,25	100

Dengan demikian capaian indikator makro daerah untuk Semester II tahun 2019 untuk jumlah masyarakat yang mengurus perizinan sudah mencapai target yang diharapkan.

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran ini antara lain:

1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Penyelenggaraan Perizinan
2. Insentif untuk aparatur perizinan
Insentif ini masuk dalam tunjangan beban kerja pada belanja tidak langsung

Untuk indikator sasaran jumlah masyarakat yang mengurus perizinan merupakan indikator baru. Dimulai pada tahun 2019 sehingga untuk Tahun 2018 tidak ada targetnya dan Tahun 2019 dari target 500 izin tercapai 927 izin pada semester II tahun 2019.

Sedangkan untuk Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Semester II Tahun 2019 sebesar 81,25 dan Tahun 2018 sebesar 80,35 % .

Untuk target pendapatan sudah terealisasi 100% (Rp. 900.000,-) pada semester II tahun 2019. Sedangkan untuk target retribusi izin sejak tahun 2018 sudah berada pada dinas teknis.

Dari jumlah Surat izin yang telah diterbitkan sampai Semester II tahun 2019, yaitu IMB 344 berkas yang diterbitkan dan retribusi berada pada dinas PUPR. Rekapitulasi penerbitan izin dan pemasukan PAD dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6.



Tabel 3.5
Rekapitulasi Surat Izin yang Diterbitkan selama Semester II tahun 2019

No.	Jenis Ijin	Terbit 2019 (Semester II)
1.	IMB	344
2.	SIUJK	-
3.	IJIN TRAYEK	1
4.	SITU & SIDOM	5 & 0 = 5
5.	SIUP	-
6.	TDP	6
7.	REKLAME	183
8.	TANDA DAFTAR GUDANG	-
9.	IZIN PENYELENGGARAAN APOTIK	-
10.	IZIN PRAKTEK APOTEKER	-
11.	IZIN PRAKTEK BIDAN	32
12.	IZIN PRAKTEK PERAWAT	26
13.	IZIN PRAKTEK DOKTER	24
14.	IZIN LOKASI	-
15.	SURAT IZIN KLINIK PRATAMA	-
16.	SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER	9
17.	SURAT IZIN PRAKTEK TERAPIS GIGI DAN MULUT	4
18.	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL	-
19.	IZIN USAHA HIBURAN	-
20.	NIB	266
21.	IZIN PENELITIAN	10
22.	IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN	6
23.	TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN (TTK)	6
24.	SURAT IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	1
25.	SURAT PENCABUTAN IZIN PRAKTEK DOKTER DAN SURAT IZIN KLINIK	4
	Jumlah	927



Dari Tabel 3.5 terlihat Surat Izin yang banyak diterbitkan adalah IMB dan REKLAME.

Tabel 3.6

**Perbandingan Target yang dicapai dengan Pemasukan PAD
sampai Semester I tahun 2019**

No.	Jenis Pendapatan Asli Daerah	Pemasukan (Rp)	Persentase rata - rata(%)	Target (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (Rumah dinas)	900.000	100	900.000
	Jumlah	900.000	100	900.000

Dari perbandingan antara pemasukan PAD dengan target yang dicapai dapat dilihat pada Tabel 3.6 sudah terealisasi 100% dan diperkirakan akan memenuhi target pada semester II tahun 2019.

Adapun program – program yang mendukung pencapaian kinerja indikator sasaran dan tingkat pencapaiannya adalah :

No	Program	Tingkat Capaian Program				Ket
		SB	B	CB	TB	
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur				Tidak Berhasil	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sangat Berhasil				
3	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			Cukup Berhasil		
4	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Sangat Berhasil				
5	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Sangat Berhasil				
6	Peningkatan Disiplin Aparatur	Sangat Berhasil				
7	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Sangat Berhasil				



Dari 8 (delapan) Program yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Sangat Berhasil	5	71,43
b. Berhasil	-	-
c. Cukup Berhasil	1	14,28
d. Tidak Berhasil	1	14,28
Jumlah	7	100 %

Analisis kinerja per indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur”, lebih menekankan pada pendidikan dan pelatihan formal sudah terealisasi sekitar 60%

“Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur”, lebih menekankan pada pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terealisasi sekitar 93,33%.

“Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi”, lebih menekankan pada bidang Penanaman Modal yang terealisasi sekitar 75%.

“Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi”, lebih menekankan pada bidang Penanaman Modal yang terealisasi sekitar 100%.

“Program Peningkatan Pelayanan Perizinan”, lebih menekankan pada sosialisasi perizinan, monitoring dan evaluasi perizinan, Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penyelenggaraan perizinan yang terealisasi sekitar 100%.

“Program Peningkatan Disiplin Aparatur”, lebih menekankan pada pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus hari hari tertentu yang terealisasi sekitar 100 %.

“Program Meningkatkan Penanganan Pengaduan Masyarakat”, lebih menekankan pada pelayanan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat yang terealisasi sekitar 100 %.



C. Realisasi Keuangan

Untuk mendukung capaian Program Kegiatan Tahun 2019 telah ditetapkan Anggaran Belanja seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 sebesar **Rp. 5.323.032.897,-**. Sampai dengan Semester II 2019 telah terealisasi untuk realisasi fisik sebesar **95,52% dan realisasi keuangan sebesar 88.02% .**

Program Kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2019 adalah :

1. Program Kegiatan Administrasi Perkantoran, pagu anggaran **Rp 1.524.989.922,-**
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pagu anggaran **Rp 549.489.600,-**
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pagu anggaran **Rp 27.470.000,-**
4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, pagu anggaran **Rp 371.178.836,-**
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, pagu anggaran **Rp 83.397.800,-**
6. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, pagu anggaran **Rp 105.028.500,-**
7. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, pagu anggaran **Rp 10.000.000,-**
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur **Rp. 41.925.000,-**

Laporan Akuntabilitas Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dapat dilihat dari Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Per 31 Desember 2019 dan Rekapitulasi Laporan Keuangan dan Fisik Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung s/d 31 Desember TA. 2019.





BAB 4

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Semester II Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja Kepala Dinas kepada Bupati Lamandau dan masyarakat. LAKIP melaporkan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan tahun kedua dalam pelaksanaannya, rencana kinerja (*performance plan*) dan Arah Kebijakan Umum Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

Tahun 2019 merupakan lanjutan Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang sudah mulai teralisasi bulan Pebruari 2009 dengan adanya Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dan merupakan penggabungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya diatur kembali melalui Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Jenis Perizinan yang telah teralisasi adalah SIUP, SITU (SPP, SIDOM, REKLAME), TDP, SIUJK, IMB, izin klinik, izin Praktek/Kerja Bidan, Perawat, dan Dokter. Dari Rekapitulasi Izin yang diterbitkan paling banyak adalah NIB, REKLAME dan IMB.

Untuk mendukung capaian sasaran tahun 2019 telah ditetapkan Anggaran Belanja seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 sebesar **Rp 5.323.032.897,-**



Dari pengukuran pencapaian sasaran pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau, penilaian kinerja pada Semester II, **Berhasil** dengan nilai pencapaian indikator **89,76%**.

Secara umum penerapan dan pengembangan LAKIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau masih tetap memerlukan dorongan untuk mengembangkan dan mempertahankan komitmen berakuntabilitas, karena ditinjau dari sistematika penyusunan yang masih beragam dan belum lengkapnya informasi yang disajikan, diharapkan akan terus ditingkatkan dan disempurnakan dimasa yang akan datang.

REKAPITULASI IJIN TAHUN 2010 - 2012

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SKPD : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN : 2013

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			NARASI
			2010	2011	2012	
1	2	3	5	6	7	8
1	Kualitas Pelayanan Publik	Lama Proses Perijinan :				
		Izin Mendirikan Bangunan (Hari)	77	99	70	
		Izin Usaha Jasa Konstruksi (Hari)	40	44	38	
		Izin HO skala rendah (Hari)	0	37	49	
		Pendaftaran Perusahaan (Hari)	42	4	0	
		Izin Tempat Usaha / Izin Domisili (Hari)	153	408	211	
		Reklame (Hari)	0	190	368	
		Izin Usaha Perdagangan (Hari)	143	183	222	
		Tanda Daftar Perusahaan (Hari)	96	172	168	
		Tanda Daftar Gudang (Hari)	0	0	0	
		Izin Usaha Angkutan Bermotor (Hari)	69	0	16	

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
 Penanaman Modal
 Kabupaten Lamandau,

Drs. H. Adi Kusuma
 NIP. 19580717 198606 1 001

PENGUKUR KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SKPD : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN : 2013

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2012	REALISASI			NARASI
				2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kualitas Pelayanan Publik	Lama Proses Perijinan :					
		Izin Mendirikan Bangunan (Hari)	12	14	14	12	
		Izin Usaha Jasa Konstruksi (Hari)	10	14	14	10	
		Izin HO skala rendah (Hari)	10	12	12	10	
		Pendaftaran Perusahaan (Hari)	2	3	3	2	
		Izin Tempat Usaha / Izin Domisili (Hari)	7	10	10	7	
		Reklame (Hari)	2	2	2	2	
		Izin Usaha Perdagangan (Hari)	3	5	5	3	
		Tanda Daftar Perusahaan (Hari)	3	5	5	3	
		Tanda Daftar Gudang (Hari)	3	5	5	3	
		Izin Usaha Angkutan Bermotor (Hari)	12	14	14	12	

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal
Kabupaten Lamandau,

Drs. H. Adi Kusuma
NIP. 19580717 198606 1 001

TABEL PENGUKURAN KINERJA

SKPD : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN : 2014

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	8
42	Meningkatnya Pembangunan Penanaman Modal	Jumlah Investasi berskala Nasional (PMDA / PMA) (unit)	33	15	45%
		Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDA dalam triliyun Rupiah / PMA dalam US \$ Juta)	1.485.115.676.787 683.255.495.787	2.735.814.575.150 650.719.519.193	184% 95%
		Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	70.719.794.228	455.365.525.399	

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal
Kabupaten Lamandau,

Drs. H. Adi Kusuma
NIP. 19580717 198606 1 001

TABEL PENGUKURAN KINERJA

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2014

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014	REALISASI	%
1	2	3	4	5	8
10	Kualitas Pelayanan Publik	Lama Proses Perijinan :			
		Izin Mendirikan Bangunan (Hari)			
		Izin Usaha Jasa Konstruksi (Hari)			
		Izin HO skala rendah (Hari)			
		Pendaftaran Perusahaan (Hari)	3	3	100
		Izin Tempat Usaha / Izin Domisili (Hari)	3	3	100
		Reklame (Hari)	3	3	100
		Izin Usaha Perdagangan (Hari)	1	1	100
		Tanda Daftar Perusahaan (Hari)	1	1	100
		Tanda Daftar Gudang (Hari)	1	1	100
		Izin Usaha Angkutan Bermotor (Hari)			

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal
Kabupaten Lamandau,

Drs. H. Adi Kusuma
NIP. 19580717 198606 1 001

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT KABUPATEN

KABUPATEN : LAMANDAU
SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU & PENANAMAN MODAL
THN ANGGARAN : 2013

ISU STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2013	REALISASI 2013	TARGET 2012	REALISASI 2012	SKPD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Pembangunan	- Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	33 unit	16 unit	27 unit	14 unit	BPPTPM	PMDN (11), PMA (5)
Penanaman Modal	- Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN dalam Milyar Rupiah/PMA dalam US \$ Ribu	4,902 Rupiah	PMDN = 2085222686868	4.902.866,838 Rupiah	1.414.395 Rupiah		Data Realisasi Investasi Perusahaan PMA dan PMDN Bid. Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Tahun 2012 & 2013
		441 US \$	PMA = 650719519193	441.846.046 US \$	650.719.519 US \$		
	- Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah	771 Rupiah	Naik PMDN = 667072390162	658.835.163.500 Rupiah	131.562.063.694 Rupiah		
Pelayanan Publik	Lama Proses Perijinan :						
	Izin Mendirikan Bangunan (Hari)	12	12	12	12	BPPTPM	
	Izin Usaha Jasa Konstruksi (Hari)	10	10	10	10		
	Izin HO skala rendah (Hari)	10	10	10	10		
	Pendaftaran Perusahaan (Hari)	2	2	2	2		
	Izin Tempat Usaha / Izin Domisili (Hari)	7	7	7	7		
	Reklame (Hari)	2	2	2	2		
	Izin Usaha Perdagangan (Hari)	3	3	3	3		
	Tanda Daftar Perusahaan (Hari)	3	3	3	3		
	Tanda Daftar Gudang (Hari)	3	3	3	3		
	Izin Usaha AngkutanBermotor (Hari)	12	12	12	12		

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT KABUPATEN**

KABUPATEN : LAMANDAU
SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
THN ANGGARAN : 2019

ISU STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI SEMESTER II 2019	TARGET 2018	REALISASI SEMESTER II 2018	SKPD	KETERANGAN
1	2	3	4	3	4	7	8
Meningkatnya realisasi investasi Daerah	Nilai Investasi berskala nasional PMDN	7.773.449.487.169	7.719.845.325.664	1.930.674.735.497	7.571.542.268.183		Data Realisasi Investasi Perusahaan PMA dan PMDN Bid. Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan
	Nilai Investasi berskala nasional PMA	1.564.530.989.112	1.564.767.538.712	650.719.519.193	1.564.530.989.112		
	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi PMDN dan PMA	2,21	1,63	67,96	2,21		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Investasi dan Perizinan	Jumlah Masyarakat yang mengurus Perizinan (jumlah izin)	500	927	-	-	DPMPTSP	Surat Izin terbit
	Survei kepuasan masyarakat pelayanan perizinan	81,25	81,25	80,00	80,35		Laporan Hasil Kegiatan Survei IKM

Kepala Dinas,



Ir. H. MASRUN, M.Si

NIP. 196000906 198903 1 018

,

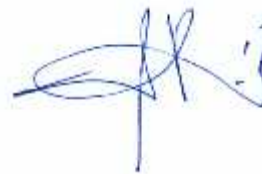
	7.374.359.683.699
-1	7.314.359.683.699
-0,262948612	60.000.000.000

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT KABUPATEN**

KABUPATEN : LAMANDAU
SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
THN ANGGARAN : 2019

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	Satuan	SEMESTER II 2019		Capaian Kinerja (%)	KETERANGAN
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya realisasi investasi Daerah	Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	(Rp)	9.337.980.476.281	9.284.612.864.376	99,43	Data Realisasi Investasi Perusahaan PMA dan PMDN Bid. Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan
	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi PMDN dan PMA	persen	2,21	1,63	73,57	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Investasi dan Perizinan	Jumlah Masyarakat yang mengurus Perizinan	Izin	500	927	185,40	Surat Izin terbit
	Survei kepuasan masyarakat pelayanan perizinan	indeks	81,25	81,25	100,00	Laporan Hasil Kegiatan Survei IKM
	CAPAIAN SASARAN				114,60	

Kepala Dinas,



NIP. 196000906 198903 1 018

9136073257295,00

9938853845920,58

#VALUE!

9938853845920

8,786932482

#REF!

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

KABUPATEN : LAMANDAU
SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
THN ANGGARAN : 2019

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	KETERANGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya realisasi investasi Daerah	Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	(Rp)	9.337.980.476.281	Data Realisasi Investasi Perusahaan PMA dan PMDN Bid. Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan
	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi PMDN dan PMA	persen	2,21	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Investasi	Jumlah Masyarakat yang mengurus Perizinan	Izin	500	Surat Izin terbit
	Survei kepuasan masyarakat pelayanan perizinan	indeks	81,25	Laporan Hasil Kegiatan Survei IKM

Kepala Dinas,



Ir. H. MASRUN, M.Si

NIP. 196000906 198903 1 018

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT KABUPATEN**

KABUPATEN : LAMANDAU
SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
THN ANGGARAN : 2019

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Semester II Tahun 2019		Capaian Kinerja (%)	Semester II Tahun 2018		Capaian Kinerja (%)	KETERANGAN
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya realisasi investasi Daerah	Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	9.337.980.476.281	9.284.612.864.376	99,43	2.581.394.254.690	9.136.073.257.295	353,92	Data Realisasi Investasi Perusahaan PMA dan PMDN
	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi PMDN dan PMA	persen	2,21	1,63	73,57	67,96	2,21	3,25	Bid. Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Investasi dan Perizinan	Jumlah Masyarakat yang mengurus Perizinan	Izin	500	927	185,40	-	-	-	Surat izin terbit
	Survei kepuasan masyarakat pelayanan perizinan	indeks	81,25	81,25	100,00	80	80,35	100,44	Laporan Hasil Kegiatan Survei IKM
	CAPAIAN SASARAN				114,60			114,40	

Kepala Dinas,



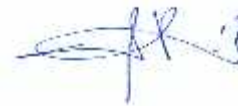
Ir. H. MASRUN, M.Si
NIP. 196000906 198903 1 018

**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN**

KABUPATEN : LAMANDAU
THN ANGGARAN : 2019

No.	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Semester II Tahun 2019		Capaian Kinerja (%)	KETERANGAN
				Target	Realisasi		
1	1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya realisasi investasi Daerah	Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	9.337.980.476.281	9.284.612.864.376	99,43	Data Realisasi Investasi Perusahaan PMA dan PMDN Bid. Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan
		Persentase Peningkatan Nilai Realisasi PMDN dan PMA	persen	2,21	1,63	73,57	
26.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Investasi dan Perizinan	Jumlah Masyarakat yang mengurus Perizinan	Izin	500	927	185,40	Surat izin terbit
		Survei kepuasan masyarakat pelayanan perizinan	indeks	81,25	81,25	100,00	Laporan Hasil Kegiatan Survei IKM

Kepala Dinas,



Ir. H. MASRUN, M.Si
NIP. 196000906 198903 1 018

DPMPTSP					
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Dan capaian Kinerja tahun 2016		Keterangan
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
12	Penanaman Modal				
12.1	Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA) (Unit)	32	22	35	
12.2	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (juta rupiah)				
	PMDN dalam Milyar Rupiah	4.289.762.979.492	1.620.907.424.934	5.275.813.039.321	
	PMA dalam U	825.814.041.495	650.719.519.193	1.567.397.857.798	
12.3	Rasio Daya serap tenaga kerja (%)				
12.4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	2.063.807.335.980	3.097.993.443.910	1.727.633.876.132	
3.3	jenis, kelas, dan jumlah restoran (Buah)				
3.4	jenis, kelas, dan jumlah penginapan (Buah)				
3.1	jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit)				
3.2	jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)				

	2018	2019	2020	2021
9136073257295,00				
		2,21	2,25	2,3
2,21	8,78	8,57	3,13	
	2,21	2,21	2,25	2,30
201.907.218.986,22	201.907.218.986,22	210.104.560.716,33	219.605.955.850,94	
9.337.980.476.281,22				
9.337.980.476.281,22	9.337.980.476.281,22	9.548.085.036.997,55	9.767.690.992.848,49	
9.136.073.257.295,00	9.337.980.476.281,22	9.548.085.036.997,55	9.767.690.992.848,49	
	1,625858319	210.104.560.716,33	219.605.955.850,94	
	9284612864376,00			
9284612864376,00				
	1,63			

	2022	2023
	2,35	2,4
1,38	2,77	
	2,35	2,40

229.540.738.331,94 239.933.561.548,33

9.997.231.731.180,43 10.237.165.292.728,80

9.997.231.731.180,43 10.237.165.292.728,80



PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN SEMESTER II TAHUN 2019

NAMA SKPD

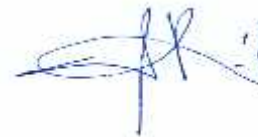
: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. LAMANDAU

Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1 2 3 4 6 7	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur				60,00	
	1 Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	kali	5	3	60,00	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				100,00	
	1 Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Jenis	4	4	100,00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				93,33	
	1 Jumlah atau luasan gedung kantor yang dibangun	Paket	3	2	66,67	
	2 Jumlah Waktu atau luasan gedung kantor yang dipelihara	Bulan	12	12	100,00	
	3 Jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Paket	7	7	100,00	
	4 Jumlah atau luasan halaman yang dilakukan penataan	Paket	3	3	100,00	
	5 Jumlah kendaraan yang dipelihara	unit	3	3	100,00	
	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan				100,00	
	1 Jumlah laporan SKM	laporan	2	2	100,00	
	2 Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan Perijinan	Orang	120	120	100,00	
	3 Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	Kecamatan	8	8	100,00	
	4 Jumlah Data Perizinan	Kecamatan	2	2	100,00	
	5 Cakupan Penyelegaraan Perizinan	Bulan	12	12	100,00	
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat				100,00	
	1 Jumlah Waktu Layanan Informasi dan penanganan pengaduan masyarakat	bulan	12	12	100,00	
	Meningkatnya Investasi Daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama			75,00	

Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran Program		Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target	Ket.
1	2		3	4	5	6	7
8	Investasi					75,00	
	1	Jumlah Informasi Unggulan Daerah yang dipublikasikan	Informasi unggulan daerah	3	3	100,00	
	2	Jumlah Pameran dan promosi didalam dan di luar Negeri yang diikuti	kali	3	0	0,00	
	3	Jumlah Temu Usaha PMA, PMDN dan UMKM	kali	1	1	100,00	
	4	Jumlah Pameran Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan	Kali	1	1	100,00	
	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi					100,00	
	1	Jumlah Kunjungan Peningkatan Pemantauan, Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kali	12	12	100,00	
	2	Jumlah Kunjungan Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS	Kali	12	12	100,00	
Sangat Berhasil						89,76	

Nanga Bulik, Januari 2020

Kepala Dinas,



Ir. H. MASRUN, M.Si

NIP. 196000906 198903 1 018

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
SEMESTER II TAHUN 2019

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. LAMANDAU

Sasaran		Indikator Pencapaian Sasaran Program		Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target	Ket.
1		2		3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Investasi Daerah	1	Nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)	rupiah	9.337.980.476.281	9.284.612.864.376	99,43	
		2	Persentase Kenaikan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA	%	2,21	1,63	73,57	
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan investasi dan perizinan	3	Survei kepuasan masyarakat pelayanan perizinan	..00	81,25	81,25	100,00	
		4	Jumlah masyarakat yang mengurus perizinan	jumlah izin	500	927	185,40	
Sangat Berhasil							114,60	

Nanga Bulik, Januari 2020

Kepala Dinas,

Ir. H. MASRUN, M.Si

NIP. 196000906 198903 1 018

2015	2014
825814041495	650719519193
4289762979492	2.735.814.575.150
5115577020987	3386534096357

1729042924630

51,05641566

5115577020987



76,000000000

Handwritten signature or mark.